
Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Talaud Melalui Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap di Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT)

Mira Yustina Daruit ¹

Herman Nayoan ²

Ismail Sumampow ³

ABSTRAK

Perikanan merupakan objek yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia seharusnya mampu memberdayakan masyarakat untuk kesejahteraan yang berada di area pengembangan perikanan. tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi perikanan tangkap yang dilakukan di SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu, 1. Untuk mengetahui usaha-usaha pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di SKPT Kabupaten Talaud dalam rangka pengembangan potensi perikanan tangkap, 2. Untuk mengetahui kendala-kendala SKPT Kabupaten Talaud dalam pengembangan potensi perikanan tangkap dan 3. Untuk mengetahui kelompok-kelompok masyarakat Kabupaten Talaud dalam rangka pengembangan potensi perikanan tangkap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian usaha – usaha pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh Pemerintah di SKPT Kepulauan Talaud berupa pelatihan untuk penguatan kapasitas nelayan, telah disalurkan bantuan- bantuan oleh pemerintah, dan disediakan fasilitas penunjang untuk kelancaran kegiatan nelayan di SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat, Perikanan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Indonesia dengan sebutan Negara maritim serta memiliki *coastal line* yang hampir seperlima panjang pantai dunia memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar. Indonesia juga dikenal kaya dengan *marine diversity* dimana lebih dari 450 *spesies coral* dan lebih dari 2000 spesies ikan berada di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, Indonesia adalah Negara Kepulauan, yang terdiri dari 17.506 pulau, panjang garis pantai lebih dari 80.570 km, luas laut teritorial sekitar 285.005 km, luas laut perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) sejumlah 2.692.762 km, luas perairan dalam pedalaman 2.012.392 km, dan luas daratan 2.012.402 dengan luas total perairan Indonesia adalah 5.877.879 km. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Salah satu sumber daya alamnya yang melimpah adalah sektor kelautan dan perikanan.

Disamping itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan terutama perikanan tangkap agar tetap lestari, beberapa kebijakan telah dikeluarkan yaitu :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) nomor 10 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 56/permen-KP/2014 tentang penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Menteri kelautan dan perikanan (Permen-KP) nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia.
3. Surat Menteri kelautan dan perikanan nomor B.622.MEN/KP/XI/2014 tentang permohonan terhadap seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengelola sumber daya secara

berkelanjutan, oleh karena itu, supaya potensi perikanan tangkap akan tetap lestari dan itu juga alasan utama untuk adanya pengembangan potensi perikanan tangkap yaitu sebagai sektor unggulan dalam kemajuan perekonomian dan pembangunan nasional.

Khusus untuk perikanan tangkap potensi Indonesia dapat diharapkan menjadi sektor unggulan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari. ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan penerimaan Negara yang mengarah pada kesejahteraan rakyat yang ada di Indonesia

Untuk Kabupaten Kepulauan Talaud sendiri, produksi perikanan laut meliputi penangkapan ikan di laut dan budidaya ikan. Untuk produksi perikanan laut dari hasil penangkapan didominasi oleh Kecamatan Salibabu sebesar 1.131,2 ton di 2015.

Mengacu dari data-data di atas sehingga oleh kebijakan Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang merupakan program kerja dari Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka direalisasikannya kebijakan pembangunan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Kepulauan Talaud yang berkedudukan di Desa Dalam Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan implementasi Nawa Cita "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan. Merupakan perwujudan 3 (tiga) pilar pembangunan kelautan dan perikanan (Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan). SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, merupakan satu-satunya dari 12 SKPT yang menjadi Proyek Strategi Nasional (PSN) dari sektor kelautan

perikanan sesuai Perpres No. 58/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (lampiran Perpres, Nomor 245). Sehingga lokasi SKPT Talaud terletak di Pelabuhan Perikanan Salibabu, Desa Dalam Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 716 untuk Talaud. Potensi Kepulauan Talaud 383.000 ton/tahun, sedangkan yang dimanfaatkan sekitar 15.000 ton/tahun (4% nya).

Visi dan Misi SKPT adalah mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di pulau-pulau kecil terluar/kawasan perbatasan. Serta memiliki Misi membangun pusat industri perikanan baru yang inovatif, unggulan, dan berdaya saing guna memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan industri perikanan Nasional.

Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata "berdaya" artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, erdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan.

Pemberdayaan pada intinya diartikan sebagai berikut. " membentuk klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan social dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan.

Tinjauan Pustaka Konsep Pemberdayaan

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut (Sumodiningrat, Gunawan, 2002) ;

1. Upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.
2. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.
3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembanguan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat peoplecentered, participatory, empowerment and sustainable (Chamber, 1995). Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic need) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi

tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002).

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ kesenjangan/ ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004).

Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan senantiasa tercipta dan hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti itu, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Beberapa definisi Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli

1. Rappaport (1985). Pemberdayaan masyarakat adalah sekumpulan praktek dan kegiatan yang diungkapkan dalam bentuk simbol simbol. Simbol simbol tersebut kemudian mengkomunikasi kekuatan yang tangguh untuk untuk mengubah hal hal yang terkandung dalam diri kita (*inner space*), orang lain yang dianggap penting serta masyarakat kita.
2. Sumodiningrat (1999). Arti pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) adalah agenda

konsep dan pembangunan yang mendukung kemampuan masyarakat. Tujuan yang diharapkan dalam pemberdayaan ini ialah menciptakan kehidupan masyarakat yang mandiri, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, ataupun dalam bidang, industri

3. menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Pemberdayaan Masyarakat

Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

Banyak deskripsi yang dituliskan oleh para pakar mengenai pengertian masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, berarti "kawan". Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti "ikut serta, berpartisipasi". Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling "bergaul", atau dengan istilah ilmiah, saling "berinteraksi" (Koentjaraningrat, 2009: 116). Menurut Phil Astrid S. Susanto (1999: 6), masyarakat atau *society* merupakan manusia sebagai satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang, sedangkan menurut Dannerius Sinaga (1988: 143), masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan

seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan. Keterikatan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang kritis (Dannerius Sinaga, 1988: 152). Menurut Rentelu, Pollis dan Shcaw yang dikutip dalam (P. J Bouman. 1980: 53) masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang statis tidak ada perubahan dan dinamika yang timbul dalam kehidupan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang melangsungkan kehidupannya berdasar pada patokan kebiasaan adat-istiadat yang ada di dalam lingkungannya. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya, sehingga kehidupan masyarakat tradisional cenderung statis. Menurut P. J Bouman (1980: 54-58) hal yang membedakan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan alam sekitarnya. Faktor ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam. Oleh karena itu masyarakat tradisional mempunyai karakteristik tertentu yang menjadi ciri pembeda dari masyarakat modern. Ciri-ciri masyarakat tradisional berdasarkan pandangan sosial berbeda dengan ciri masyarakat berdasarkan pandangan hukum. Karakteristik masyarakat tradisional berdasarkan hukum dapat dilihat pada pendapat yang dikemukakan oleh Amiruddin (2010: 205), bahwa 16 masyarakat tradisional cenderung mempunyai solidaritas sosial mekanis. Solidaritas mekanis merupakan solidaritas yang muncul atas kesamaan (keserupaan), konsensus dan dapatnya saling dipertukarkan antara individu yang satu dengan individu yang lain berada dalam kelompok itu. Tidak ada kekhususan pada masing-masing individu (OK. Chairuddin, 1993: 115). Berbeda dengan pendapat Selo Soemardjan (1993: 186) disiplin hukum masyarakat tradisional

terhadap hukum negara lemah. Akan tetapi disiplin terhadap hukum adat cukup kuat. Sosial control dan disiplin hukum adat akan digunakan oleh masyarakat untuk mengatur ketertiban tata hidup sosialnya.

Konsep Pengembangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian ini mengikuti suatu langkah-langkah secara siklus. Langkah penelitian atau proses pengembangan ini terdiri atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar di mana produk tersebut akan dipakai, dan melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan (Punaji Setyosari, 2013: 222-223). Pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri (Iskandar Wiryokusumo dalam Afrilianasari ; 2014) 11 Pengembangan adalah suatu sistem pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya

proses belajar yang bersifat internal atau segala upaya untuk menciptakan kondisi degan sengaja agar tujuan pembelajaran dapat tercapai (Gagne dan Brings dalam Warsita, 2003: 266) Dari beberapa pendapat para ahli yang ada ditarik kesimpulan bahwa pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana dan terarah untuk membuat atau memperbaiki, sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan dan mendukung serta meningkatkan kualitas sebagai upaya menciptakan mutu yang lebih baik.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lain, karena perbedaan konteks menurut Basrowi dan Suwandi (2008: 1-2). Menurut Sugiyono (2011 :3) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam moleong (2006:4) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik analisis data akan menggunakan penelitian Triagulasi pada hakekatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data

Pembahasan

Kendala-kendala Pengembangan Potensi Perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan maka kendala-kendala yang ditemui di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu yaitu :

- a. Ketersediaan Es yang belum maksimal, sehingga menghambat kegiatan pengawetan ikan hasil tangkapan

- b. BBM yang belum tersedia dengan maksimal sehingga nelayan dan pengguna BBM lainnya kesulitan memperoleh pasokan minyak yang cukup untuk operasional kegiatan nelayan.
- c. Ketersediaan Listrik yang masih sering padam sehingga berdampak pada proses pembuatan es dan pembekuan ikan di ICS.
- d. Kapasitas ABF yg masih berukuran kecil yang belum mampu menampung jumlah ikan lebih dari 6 Ton per harinya.
- e. Tidak tersedianya alat pengangkut ikan skala kecil

Dari kendala-kendala inilah yang masih menghambat kegiatan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu Kabupaten kepulauan Talaud dalam pengembangan program-program prioritas SKPT. Karena 5 (lima) hal itu merupakan penunjang utama dalam peningkatan produksi perikanan di SKPT Kab Kepulauan Talaud. Selain kendala-kendala di atas, faktor cuaca pula sangat berpengaruh dalam proses kelancaran kegiatan perikanan di wilayah SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kelompok – Kelompok Masyarakat di SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud

Dalam kegiatan pengembangan potensi perikanan yang ada di SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud, tidak terlepas dari sumberdaya manusianya. Sehingga dalam kegiatan pengembangan ini pula maka SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud didukung oleh Koperasi Perikanan, KUB dan POKLASAR, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Teluk Lawasan Indah
2. Koperasi Tirta Mas
3. Koperasi Berkat Anugerah
4. Koperasi Abengaren
5. Koperasi Camar Laut
6. Koperasi Tunas Baru
7. Koperasi Karunia
8. Koperasi Pelangi Kasih
9. Koperasi Tunas Mandiri
10. Koperasi Mane'e
11. Koperasi Dolpin Perbatasan
12. Koperasi Tundaal
13. Koperasi Embun Kasih

Dari 13 Koperasi Perikanan ini juga didukung oleh KUB - KUB dan Poklasar yang ada di naungan koperasi. Sehingga dengan adanya kelompok usaha ini maka menunjang untuk rencana – rencana pengembangan produksi perikanan yang ada di SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud.

Model – Model Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yang ada di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu selalu dipengaruhi oleh 2 (dua) Faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

- Kurang bisa saling percaya
- Kurang daya inovasi/kreativitas
- Mudah pasrah/menyerah/putus asa
- Aspirasi dan cita-cita rendah
- Tidak mampu menunda menikmati hasil kerja
- Wawasan waktu yang sempit
- Familisme
- Sangat tergantung pada bantuan pemerintah
- Sangat terikat dengan tempat kediaman

b. Faktor Eksternal

- Kebijakan pemerintah (kurang memihak)
- Sumberdaya alam (tidak mendukung)
- Kelembagaan sosial (lemah)
- Ekonomi (tidak memihak)
- Budaya (tidak mendukung)
- Infrastruktur (kurang/rendah)

Dari kedua faktor ini maka perlu suatu pengembangan pemberdayaan masyarakat di lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Talaud. Oleh karena itu menurut Jack Rothman dalam klasiknya mengembangkan tiga model yang berbunga dalam memahami konsep tentang pemberdayaan masyarakat diantaranya:

- a. Pemberdayaan masyarakat lokal.
- b. Perencanaan sosial.
- c. Aksi sosial Tujuan dan sasaran aksi sosial

Dalam pengembangan produksi perikanan tangkap maka dalam penelitian ini menjabarkan seluruh kegiatan pemberdayaan yang dilakukan untuk meningkatkan sumberdaya yang ada di SKPT Talaud.

Strategi – strategi Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap

Dalam melakukan pengembangan potensi perikanan tangkap di SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud, banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pengolahan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa Pelatihan untuk pengembangan sumberdaya manusia, berupa pelatihan peningkatan pengetahuan nelayan dalam proses penangkapan ikan, meningkatkan pengetahuan kelompok dalam manajemen kelompok atau Koperasi perikanan serta proses pengembangan berupa perawatan mesin kapal perikanan dan pembuatan kapal dari Faiber glass.

Berdasarkan hasil penelusuran kajian data diskusi yang diperoleh dari beberapa unsur di lapang, maka telah teridentifikasi atau diperoleh strategi pengembangan produksi perikanan di lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu meliputi strategi-strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha di bidang perikanan
3. Melakukan Pembinaan usaha mikro dan kecil sektor KP (UMK KP)
4. Meningkatkan legalitas kelembagaan usaha perikanan
5. Fasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam akses informasi dan teknologi Kelautan Perikanan yang dibutuhkan
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
7. Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna yang berdaya saing.

8. Fasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam akses permodalan / pembiayaan usaha KP
9. Meningkatkan akses nelayan dan pemasar terhadap lembaga penyalur modal usaha keuangan baik itu dari LPMUKP maupun jasa keuangan lainnya berupa perbankan atau yang sejenisnya.
10. Mengusahakan Pemerintah daerah dalam menyiapkan atau bekerjasama dengan PT/Cv yang beroperasi dalam lingkup Perikanan dan Kelautan untuk penyediaan usaha pengolahan hasil perikanan
11. Fasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam akses pasar hasil perikanan
12. Lebih meningkatkan upaya pemberdayaan usaha perikanan kepada masyarakat, melalui berbagai penyuluhan, pelatihan dan pendampingan untuk penguatan perorangan atau kelompok.
13. Mengembangkan kerjasama lintas sektoral dan lintas wilayah
14. Meningkatkan upaya pelestarian sumberdaya perikanan
15. Mengembangkan sistem dan usaha agrobisnis perikanan sesuai dengan daya dukung lingkungan, serta memfasilitasi berkembangnya kerjasama kemitraan agribisnis perikanan baik pada tingkat hulu maupun hilir
16. Membina terwujudnya kawasan sentra produksi dalam rangka terwujudnya daerah minapolitan Pembinaan kelompok masyarakat
17. pengawas (Pokmaswas)
18. Meningkatkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
19. Mensosialisasikan peraturan terkait kelautan dan perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan

Dalam usaha meningkatkan produksi perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu yang dibutuhkan dalam peningkatan produktifitas ini mencakup dalam poin pertama yaitu Meningkatkan kapasitas sumberdaya

manusia, dimana dalam strategi ini apabila sumberdaya manusia dapat berkembang atau mengalami kemajuan, maka akan terciptanya usaha – usaha dalam bidang perikanan melalui kelompok – kelompok yang bergerak dalam bidang Perikanan dan Kelautan. Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha di bidang perikanan. Dari usaha –usaha yang dilakukan oleh masyarakat maka terbentuklah kelompok-kelompok, baik itu kelompok Mikro kecil atau kelompok dalam bentuk Kelompok Koperasi Perikanan.

Untuk pengembangan selanjutnya dalam kegiatan ini, maka setiap kelompok harus meningkatkan kelembagaan kelompok baik dalam segi penguatan kelompok maupun pembuatan badan hukum kelompok, sehingga kelompok – kelompok ini dapat diakui secara sah oleh pemerintah.

Dalam kegiatan pengembangan produksi perikanan tangkap pula pentingnya suatu kelompok dalam mengakses informasi – informasi terkait Kelautan dan Perikanan, berupa informasi cara memperoleh modal usaha perikanan, memperoleh akses pemasaran hasil perikanan bahkan memperoleh informasi terkait perkembangan teknologi dalam peningkatan produksi perikanan tangkap di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu. Dalam kegiatan peningkatan produksi perikanan pula, maka harus lebih giat lagi dalam meningkatkan upaya pemberdayaan usaha perikanan kepada masyarakat, melalui berbagai macam cara yaitu penyuluhan, pelatihan dan pendampingan perorangan maupun pendampingan kelompok untuk penguatan kapasitas sumberdaya manusia, dalam menunjang peningkatan sumberdaya perikanan. Untuk menunjang hal tersebut perlulah suatu kelompok atau perorangan melakukan kegiatan – kegiatan kerja sama baik itu kerja sama dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Kerja sama atau bermitra bisa dilakukan dalam daerah maupun di luar daerah, sehingga kegiatan baik itu pemasaran maupun produksi tidak berjalan secara buntu atau tidak tepat sasaran.

Hal penting yang berhubungan dengan peningkatan produksi perikanan tangkap di SKPT Talaud adalah untuk tetap menjaga kelestarian sumberdaya perikanan sehingga sumberdaya perikanan tetap terpelihara dengan baik serta dapat berkembang dalam lingkup kelautan dan perikanan.

Oleh karena itu pentingnya bagi masyarakat yang ada di Desa Dalam terlebih lagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan untuk tetap menjaga kelestarian sumberdaya perikanan serta tetap mengakses informasi- informasi terkait dengan peraturan – peraturan tentang kelautan dan perikan di lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu untuk memperoleh peningkatan produksi perikanan tangkap di Sentra Perikanan dan Kelautan Terpadu maka harus melakukan strategi.

Penutup

Kesimpulan

Komunikasi yang terbangun dalam Hasil kajian menunjukkan bahwa usaha – usaha pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh Pemerintah di SKPT Kepulauan Talaud berupa pelatihan untuk penguatan kapasitas nelayan, telah disalurkan bantuan- bantuan oleh pemerintah, dan disediakan fasilitas penunjang untuk kelancaran kegiatan nelayan di SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud. Dari usaha – usaha yang dilakukan tentunya terdapat pula kendala-kendala dalam pengembangan potensi perikanan yaitu ketersediaan Es yang belum maksimal, BBM yang belum tersedia dengan maksimal, ketersediaan Listrik yang masih sering padam sehingga berdampak pada proses pembuatan es dan pembekuan ikan di ICS, Kapasitas ABF yg masih berukuran kecil yang belum mampu menampung jumlah ikan lebih dari 6 Ton per harinya dan tidak tersedianya alat pengangkut ikan skala kecil. Dalam kegiatan pemberdayaan untuk pengembangan produksi perikanan tangkap di SKPT Kabupaten Talaud ditunjang oleh kelompok-kelompok usaha dalam bidang perikanan tangkap dan pemasar berupa 13 Koperasi, KUB dan

Poklasar yang ada dinaungan Koperasi tersebut.

Saran

Meningkatkan perhatian Pemerintah dalam memperluas usaha-usaha yang dilakukan dalam penguatan kapasitas dan keterampilan nelayan, serta melengkapi setiap kendala-kendala yang ditemui berupa ketersediaan listrik yang masih sering padam yang menghambat ketersediaan Es untuk kegiatan nelayan, kurangnya pasokan BBM, dan memperbesar kapasitas ABF di SKPT Talaud. Disamping itu pula perlu upaya pemerintah dalam menamba kelompok – kelompok yang dibina untu menunjang kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Talaud.

Daftar Pustaka

- Adhitama, I. (2017). Impelentasi kebijakan pelarangan penggunaan alat penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia. Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik, 8(2), 15.*
- Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standard Kompetensi Guru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2008) hal 173*
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Angka: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud.*
- Basrowi, S.D. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.*
- Dinas Perikanan, 2020. Data Statistik Perikanan : Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud*
- Dra. Risyanti Riza, Drs.H. Roesmidi, M.M.2006. Pemberdayaan Masyarakat.*
- Muhammad. 2020. Penentuan Status Sumberdaya Perikanan Jawa Timur, Fakultas Perikanan, Unibraw, Malang*

- Pudjiastuti, S. (2016a). "Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated fishing: Menegakkan Kedaulatan dan Menjaga Keberlanjutan untuk kesejahteraan Bangsa Indonesia", dalam Pidato Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dibidang Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahayu, Sierfi.2017. Strategi Dinas Perikanan Dalam Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak (Skripsi). Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
- Sa'id,S.D. (2009). Kajian Ekonomis Penggunaan Daya Mesin Kapal Purse Seine di Perairan Pekalongan.
- Setiawan, D.2011. Strategi Pengembangan Perikanan Tangkap di Kabupaten Pacitan Berbasis pada Distribusi Ikan yang Didaratkan di PPP Tamperan. Institut Pertanian Bogor.
- Sutoro Eko, 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto Usman,2004, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Yahya, 2001, Perikanan Tangkap Indonesia, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB, Bogor.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 10 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 56/permen-KP/2014 tentang penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Negara republic Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (permen-KP) nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Negara republic Indonesia.
- Surat Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.622.MEN/KP/XI/2014 tentang permohonan terhadap seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
- Sumber Lain :**
<https://www.kkp.go.id/talaud> (diakses pada 08 Oktober 2020)
<https://eprints.uny.ac.id/8632/3/BAB%20%20-%2008417141011.pdf> (Diakses pada 01 Juli 2019. 04.36 Wita)
<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013-1-00190/MN%20Bab2001.pdf> di akses (Diakses pada 01 juli 2019. 04.38 Wita)
<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6668/5/BAB%20II.pdf> 29 juli 2019 21.43
<http://suniscome.50webs.com/32%20Konsep%20Pemberdayaan%20Partisipasi%20Kelembagaan.pdf>
<http://e-journal.uajy.ac.id/13709/3/EM204972.pdf> 29 juli 2019 21.43
 Winardi, Entrepreneur Dan Enterpreneurship, (Jakarta:Kencana. 2003), hal. 106
- Dokumen :**
 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.